



RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini adalah media untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang maksimal serta merupakan gambaran rencana kerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	16
2.3.1. Identifikasi Masalah dan Hambatan ...	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	42
3.2.1. Tujuan	42
3.2.2. Sasaran.....	42

	3.2.3. Indikator Sasaran	42
	3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	43
BAB IV	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategi merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Renstra PD kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun suatu rencana di bidang pelayanan administrasi serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun bersangkutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Karena Rencana Pembangunan Daerah yang disusun adalah tahun 2024-2026, perkiraan capaian tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra SKPD) Tahun 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 2024 s/d DENGAN TAHUN 2026	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
					REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (Tahun 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (5/4)
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu	39	13	13	33
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	2	33
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	1	1	33
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3	1	1	33
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3	1	1	33
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	1	1	33
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21	7	7	33
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	3	3	33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100

	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100/14	100/14	100/14	100
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	12	12	33
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	2	2	33
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	100%	100%	100
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	2	2	33
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	1	1	33
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3	1	1	33
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1	1	33
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	1	1	33
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	312	104	104	33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	100%	100%	100
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	3	3	33
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	7	7	29
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	68	24	24	35
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	369	123	123	33
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	16	6	6	38
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	42	14	14	33
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1.200	400	400	33

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	4	4	33
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	9	3	3	33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	100%	100%	100
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	-	0	0
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	5	5	71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	100%	100%	100
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	4	4	50
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	33
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4	4	33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	100%	100%	100
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	56	56	33
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69	23	23	33
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300	100	100	33
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	225	75	75	33
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	8	4	4	50
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	225	75	75	33

	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	100%	100%	100
	- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	1	1	100
	- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90	30	30	33
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1.152	384	384	33
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	100%	100%	100%	100
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100
	- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	30	10	10	33
	- Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	60	20	20	33
	- Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	3	1	1	33
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100
	- Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12	4	4	33
	- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12	4	4	33
	- Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	12	4	4	33
	- Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	12	4	4	33
	- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12	4	4	33
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas	100%	100%	100%	100
	- Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1	1	#DIV/0!
	- Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	1	1	20
	- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	165	55	55	33
	- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	27	9	9	33
	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18	6	6	33

	- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	150	50	50	33
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100
	- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	6	2	2	33
	- Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9	3	3	33
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100
	- Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6	1	1	17
	- Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6	1	1	17
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100
	- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9	3	3	33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya memfasilitasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang ditetapkan, digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan analisa dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam satuan unit, paket, kelompok, persen, orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			PROYEKSI TAHUN 2024	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	
2	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	
3	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	
4	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	
5	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	7	7	7	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100/14	100/14	100/14	100/14	
9	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	
10	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	2	2	2	
11	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2	2	

12	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	
13	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	1	1	1	
14	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	
15	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	
16	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	104	104	104	104	
17	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	3	3	3	
18	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	10	7	7	
19	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24	20	24	24	
20	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	123	123	123	123	
21	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	6	4	6	
22	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14	14	14	14	
23	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400	400	400	400	
24	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4	4	4	4	
25	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	3	3	3	
26	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	100%	100%	100%	
26	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4	-	-	
27	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	2	-	5	
28	Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	100%	100%	100%	

28	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	-	4	
29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	
30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	
31	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	100%	100%	100%	
31	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	56	56	56	
32	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	23	23	23	
33	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	100	100	100	
34	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75	75	75	75	
35	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	2	2	4	
36	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75	75	75	75	
37	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	-	-	1	
38	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30	30	30	30	
39	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	384	384	384	384	
40	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	10	10	10	
41	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	20	20	20	
42	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1	1	1	

43	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	4	4	4	
44	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	4	4	4	
45	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	4	4	4	
46	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	4	4	4	4	
47	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	4	4	4	
48	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	1	-	1	
49	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	2	2	1	
50	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55	55	55	55	
51	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	9	9	9	
52	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6	6	6	6	
53	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	50	50	50	50	
54	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	2	2	2	
55	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	3	3	
56	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	1	1	
57	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	1	1	
58	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	3	3	3	

Dari tabel tersebut pencapaian kinerja pada tahun 2024 secara umum mencapai target Renstra 2024-2026. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi anggota yang semakin meningkat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Sekretaris DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. DPRD mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur, fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan fungsinya tersebut diperlukan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan organisasi/kelembagaan.

Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar

kendali organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan ini terdiri dari peluang dan tantangan.

Peluang terdiri dari :

1. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Agenda reformasi yang terus bergulir telah mendorong daya kritis dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, tanpa terkecuali lembaga perwakilan rakyat daerah. Sorotan terhadap lembaga DPRD ini makin menguat dengan terkuaknya banyak kasus yang dialami oleh para anggota DPRD.

Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota

DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD atau yang dikenal dengan istilah Setwan ini harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

2.3.1. Identifikasi Masalah dan Hambatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi kelembagaan, tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin memunculkan berbagai permasalahan, meski secara umum permasalahan tersebut masih dapat diatasi. Adapun akar permasalahan yang dirasakan cukup dominan yang mengganggu terhadap belum optimalnya Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah :

1. Aspek sumber daya manusia

Permasalahan pada sumber daya aparatur Sekretariat Dewan dialami oleh seluruh Bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Sekretariat Dewan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah:

- a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan;
- b. Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;
- c. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi Sekretariat Dewan.

2. Perubahan Struktur Organisasi

Permasalahan dalam struktur organisasi merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena Sekretariat DPRD diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya perubahan struktur tersebut, setiap aparatur harus mengetahui, memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai tugas dan fungsi yang baru.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat rancangan awal RKPD tahun 2025. Ada 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 yang bisa dilihat di tabel berikut ini:

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%			
<i>1</i>	<i>4.02.01.1.01</i>	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu</i>		<i>13</i>	<i>2.620.000.000</i>			<i>0</i>	<i>2.641.000.000</i>		
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

6	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Selatan	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
7	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	4.02.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu</i>		100%	14.402.791.000			100%	14.218.560.000		
8	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	100/14 Orang/Bulan		DAU		100/14 Orang/Bulan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
9	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
10	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	2 Laporan		PAD		2 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
III	4.02.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	1.100.000.000			100%	1.220.000.000		
10	4.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
11	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

IV	4.02.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP</i>		100%	840.000.000			100%	994.000.000		
12	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	1 Paket		PAD		1 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
13	4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
14	4.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
15	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	104 Orang		PAD		104 Orang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
V	4.02.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	31.308.940.000			100%	43.430.000.000		
16	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	3 Paket		PAD		3 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
17	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	10 Paket		PAD		10 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
18	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Palembang	24 Paket		PAD		24 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
19	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	100 Paket		PAD		100 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

20	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	5 Paket		PAD		5 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
21	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Palembang	14 Dokumen		PAD		14 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
22	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	400 Laporan		PAD		400 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
23	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
24	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VI	4.02.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	6.780.000.000			100%	2.000.000.000		
25	4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	4 Unit		PAD		4 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
25	4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palembang	8 Unit		PAD		0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VII	4.02.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap</i>		100%	18.346.211.248			100%	18.230.000.000		
26	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	4 Laporan		PAD		4 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

27	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 kab/kota	12 Laporan		PAD		12 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
28	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	12 Laporan		PAD		12 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VIII	4.02.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	38.807.235.200			100%	24.500.000.000		
29	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	46 Unit		PAD		46 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
30	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	23 Unit		PAD		23 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
31	4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	100 Unit		PAD		100 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
IX	4.02.01.1.15	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu</i>		100%	58.251.910.000			100%	66.100.000.000		
32	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Palembang	75/14 Orang/Bulan		DAU		75/14 Orang/Bulan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
33	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Palembang	2 Paket		PAD		2 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

34	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sumatera Selatan	75 Orang		PAD		75 Orang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
X	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap		100%	3.570.000.000			100%	3.490.000.000		
35	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	5 Laporan		PAD		5 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
36	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Palembang	144 Paket		PAD		144 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
B	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani		100%				100%			
XI	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP		100%	1.410.000.000			100%	1.475.000.000		
37	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	10 Dokumen		PAD		10 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
38	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Palembang	6 Dokumen		PAD		6 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
39	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XII	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP		100%	200.000.000			100%	410.000.000		
40	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

41	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
42	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
43	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
44	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XIII	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu		100%				100%	120.000.000		
45	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Palembang			PAD		2 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XIV	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas		100%	33.644.330.000			100%	40.142.000.000		
46	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen		PAD		2 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
47	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	55 Orang		PAD		55 Orang		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
48	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	9 Orang		PAD		9 Orang		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
49	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	6 Dokumen		PAD		6 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
50	4.02.02.1.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sumatera Selatan	50 Dokumen		PAD		50 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

XV	4.02.02.1.05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP</i>		100%	39.925.000.000			100%	57.945.000.000		
51	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
52	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
53	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	0		PAD		75 Orang		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XVI	4.02.02.1.06	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP</i>		100%	-			100%	20.000.000		
54	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
55	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XVII	4.02.02.1.08	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP</i>		100%	140.882.600.000			100%	145.000.000.000		
56	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Palembang	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
Jumlah						392.089.017.448				421.935.560.000		

Dari analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pendukung yang keberadaannya terkait dengan keberadaan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai sasaran utama adalah terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi anggota dewan.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota dewan dalam hal memfasilitasi kegiatan rapat dan persidangan DPRD, kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan/pengendalian terhadap jalannya kebijakan yang telah ditetapkan DPRD dalam pembahasan produk hukum termasuk peraturan daerah, memfasilitasi DPRD dalam penerimaan aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, melayani kegiatan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, memfasilitasi DPRD dalam pembahasan berkaitan dengan APBD (Murni, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat 2 (dua) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dapat memenuhi tantangan dan

mengatasi hambatan yang dihadapi agar kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih optimal. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 dapat dilihat di tabel berikut ini :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA
SKPD SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu	13	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100/14	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	100%	
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	

13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	104	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14	
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17 kab/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	
31	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	23	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	

IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	
33	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Palembang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75/14	
34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2	
35	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75	
X	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	
36	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5	
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Palembang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	144	
XI	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP	100%	
38	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	
39	Pembahasan Rancangan Perda	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6	
40	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	
XII	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP	100%	
41	Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	
42	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	

43	Pembahasan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	
44	Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	4	
45	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	
XIII	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas	100%	
46	Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2	
47	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55	
48	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	
49	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6	
50	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	50	
XIV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP	100%	
50	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	
51	Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	
XV	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP	100%	
52	Penyusunan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	

53	Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	
XVI	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP	100%	
54	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan implementasi dari tahun kedua dari RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2025, RKPD Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam RPD Sumatera Selatan. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,00
		Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Rp.Juta/Kapita	73,33
		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,02
		Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)	%	5,74
		Nilai Tukar Petani	Nilai	109,56
	Meningkatnya ekosistem inovasi	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	2,75
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	%	12,85
	Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah	Neraca perdagangan	US\$ Juta	4297,41
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	%	15,82
	Terkendalinya laju inflasi daerah	Tingkat Inflasi Daerah	%	3±1
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	4,88
	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase peningkatan desa maju dan mandiri	%	6,22
Meningkatnya kemandirian transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang mandiri	%	75,00	
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	10,76	
	Gini Ratio	Ratio	0,316	
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,95
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	Pengeluaran per kapita	Rp.000/kapita/bln	11.364
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,05
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial	%	82,50
Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin		%	4,50	
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,47	
	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	
	Prevalensi Stunting	%	13,3	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,86
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,70
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,66

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,98
		Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66
		Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,90
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,13
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks	43,60
		Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)	Indeks	82,02
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Persentase penurunan tingkat kerentanan bencana	%	5,00
		Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	10,00
Peningkatan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,25 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80,88
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Integritas Daerah	Indeks	74,13
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,92

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, telaah RKP Tahun 2025, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah.

Pembangunan Tahun 2025 menjadi estafet pembangunan tahun 2024, berbagai capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan telah dicapai di 2024. Pembangunan Tahun 2025 ini

Provinsi Sumatera Selatan akan berfokus pada beberapa sektor yaitu ekonomi, infrastruktur dan sosial, dengan tema pembangunan “Penguatan Daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”. Sesuai dengan fokus dan tema pembangunan tahun 2025, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA harus didukung dengan SDM yang unggul, perekonomian daerah yang tumbuh dengan pesat, dengan dukungan infrastruktur yang mumpuni dan pelayanan pemerintah yang handal. Dengan penguatan daya saing daerah diharapkan mampu menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan.

Pembangunan tahun 2025 menjadi starting point bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tahap II RPD. Pembangunan tahun 2025 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun 2025 ini tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”. Pada tahun ini pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi. Dengan ini diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, yang didukung dengan pelayanan publik yang handal bagian dari reformasi birokrasi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan administrasi. Sasaran dalam pelayanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD;
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD;
3. Ketepatan waktu Memfasilitasi kegiatan DPRD.

3.2.3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase administrasi yang tepat waktu;
2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar;
4. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam merealisasikan suatu program, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tabel rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 digambarkan dalam tabel berikut ini :

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317) Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%			
1	4.02.01.1.01	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu</i>		13	2.620.000.000			0	2.641.000.000		
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

6	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Selatan	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
7	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	4.02.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu</i>		100%	14.402.791.000			100%	14.218.560.000		
8	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	100/14 Orang/Bulan		DAU		100/14 Orang/Bulan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
9	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
10	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	2 Laporan		PAD		2 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
III	4.02.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	1.100.000.000			100%	1.220.000.000		
10	4.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
11	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

IV	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP		100%	840.000.000			100%	994.000.000		
12	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	1 Paket		PAD		1 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
13	4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
14	4.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
15	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	104 Orang		PAD		104 Orang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
V	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik		100%	31.308.940.000			100%	43.430.000.000		
16	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	3 Paket		PAD		3 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
17	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	10 Paket		PAD		10 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
18	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Palembang	24 Paket		PAD		24 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
19	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	100 Paket		PAD		100 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

20	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	5 Paket		PAD		5 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
21	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Palembang	14 Dokumen		PAD		14 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
22	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	400 Laporan		PAD		400 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
23	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
24	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VI	4.02.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	6.780.000.000			100%	2.000.000.000		
25	4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	4 Unit		PAD		4 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
25	4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palembang	8 Unit		PAD		0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VII	4.02.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap</i>		100%	18.346.211.248			100%	18.230.000.000		
26	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	4 Laporan		PAD		4 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

27	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 kab/kota	12 Laporan		PAD		12 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
28	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	12 Laporan		PAD		12 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VIII	4.02.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%	38.807.235.200			100%	24.500.000.000		
29	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	46 Unit		PAD		46 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
30	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	23 Unit		PAD		23 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
31	4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	100 Unit		PAD		100 Unit		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
IX	4.02.01.1.15	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu</i>		100%	58.251.910.000			100%	66.100.000.000		
32	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Palembang	75/14 Orang/Bulan		DAU		75/14 Orang/Bulan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
33	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Palembang	2 Paket		PAD		2 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

34	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sumatera Selatan	75 Orang		PAD		75 Orang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
X	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap		100%	3.570.000.000			100%	3.490.000.000		
35	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	5 Laporan		PAD		5 Laporan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
36	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Palembang	144 Paket		PAD		144 Paket		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
B	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani		100%				100%			
XI	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP		100%	1.410.000.000			100%	1.475.000.000		
37	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	10 Dokumen		PAD		10 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
38	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Palembang	6 Dokumen		PAD		6 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
39	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XII	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP		100%	200.000.000			100%	410.000.000		
40	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

41	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
42	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
43	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
44	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	4 Dokumen		PAD		4 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XIII	4.02.02.1.03	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu</i>		100%				100%	120.000.000		
45	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Palembang			PAD		2 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XIV	4.02.02.1.04	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas</i>		100%	33.644.330.000			100%	40.142.000.000		
46	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen		PAD		2 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
47	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	55 Orang		PAD		55 Orang		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
48	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	9 Orang		PAD		9 Orang		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
49	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	6 Dokumen		PAD		6 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
50	4.02.02.1.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sumatera Selatan	50 Dokumen		PAD		50 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

XV	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP		100%	39.925.000.000			100%	57.945.000.000		
51	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
52	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
53	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	0		PAD		75 Orang		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XVI	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP		100%	-			100%	20.000.000		
54	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Palembang	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
55	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	1 Laporan		PAD		1 Laporan		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XVII	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP		100%	140.882.600.000			100%	145.000.000.000		
56	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Palembang	3 Dokumen		PAD		3 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
Jumlah						392.089.017.448				421.935.560.000		

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah, kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendatang.

Selain itu Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dasar untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan diharapkan dapat mendukung peran, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Atas telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kami ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.